

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Era reformasi menuntut adanya keterbukaan bagi siapapun dan telah dijamin oleh Negara untuk setiap individu didalamnya. Dalam perkembangannya informasi saat ini menuntut adanya nuansa kebebasan dan keterbukaan bagi masyarakat. Adanya kebebasan dan keterbukaan ini, oleh masyarakat diikuti dengan berbagai tindakan dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah atas berbagai kebijakan yang diwujudkan dengan meningkatnya unjuk rasa, pernyataan sikap maupun pengaduan termasuk di dalamnya menilai suatu kondisi daerah (Sumber : Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Hal ini menuntut pemerintah daerah khususnya kegiatan hubungan masyarakat (humas) menjadi sangat vital dalam usaha menyampaikan informasi kepada masyarakat dimana diperlukan suatu komunikasi yang berjalan dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Humas sebagai suatu bagian dari pemerintah daerah yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat harus dapat memberikan informasi-informasi yang ada dengan tepat, akurat, terbuka, dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visinya, sehingga masyarakat dapat

mempercayai kinerja pemerintah daerahnya dan secara tidak langsung opini publik yang positif dapat terwujud (Ruslan, 2006: 343).

Menurut Ruslan (2006: 67) humas dalam menciptakan opini publik menggunakan metode atau strategi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan faktor yang mendukung baik faktor pendukung internal maupun faktor pendukung eksternal yang ada di lingkungan kerja humas. Demikian halnya dengan humas Kabupaten Ponorogo yang memiliki strategi tertentu dalam bekerja khususnya dalam menangani ekspose kampung idiot. Bagian humas Kabupaten Ponorogo secara langsung berhubungan dengan publik-publiknya baik internal maupun eksternal dan sekaligus menjadi jembatan penghubung untuk semua publik-publiknya juga harus bisa mengelola opini publik yang muncul di masyarakat. Date: 2013.02.16 | Category: Uncategorized | Tags: **Mereka Terpaksa Berebut Gizi dengan Tikus**(Radar Ponorogo, Rabu 22 Februari 2012).

Pemberitaan di media mengenai kampung idiot digambarkan sebagai kampung yang ditelantarkan oleh pemerintah daerah dimana keberadaan kampung idiot di Ponorogo sudah ada sejak puluhan tahun dan sampai saat ini masih ada. Kondisi ini bukan karena dipelihara atau dilestarikan. Namun menghilangkan predikat idiot sendiri tentu tak semudah membalik telapak tangan. Banyak sudah program pengentasan yang dilaksanakan, pendampingan yang dilakukan elemen pemerintah maupun swasta dan juga bantuan yang diberikan. Namun, warga yang idiot itu masih saja idiot lantaran banyak warga

di desa itu yang mengalami keterbelakangan mental. Ada sebagian yang menilai sebutan kampung idiot terlalu ekstrim dan merendahkan harkat mereka. Sehingga, ada yang menggunakan istilah kampung dengan warga keterbelakangan mental. Ada lagi yang menyebutkan kampung berkebutuhan khusus. Apapun istilahnya, tak bisa dipungkiri bahwa di kampung tersebut memang banyak warga yang berkebutuhan khusus dikarenakan mengalami keterbelakangan mental atau lazim disebut idiot . Date: 2013.02.16 | Category: Uncategorized | Tags: **Mereka Terpaksa Berebut Gizi dengan Tikus** (Sumber: Radar Ponorogo, Rabu 22 Februari 2012).

Pemberitaan lain adalah sebagaimana diberitakan oleh sebagai berikut: Ratusan warga di tiga desa di Ponorogo, Jawa Timur, mengidap keterbelakangan mental atau idiot. Jangankan bekerja, berkomunikasi pun mereka kesulitan. Kemiskinan diduga kuat menjadi penyebab kasus keterbelakangan mental ini. Salah satu keluarga yang mengalami keterbelakangan mental adalah Ginem. Sehari-hari warga Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, ini pergi ke sawah mencari pakan ternak dan mengumpulkan batu atau membantu bekerja di sawah tetangganya. Dari hasil menjadi buruh tani, Ginem hanya bisa mengumpulkan sekira Rp 6.000 per hari. Uang itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama tiga adik perempuannya yang mengalami keterbelakangan mental, yakni Boimen, Janem, dan Painten, serta adik laki-laki Dayat. Sehari-hari uang yang didapat hanya cukup untuk membeli gaplek atau tiwul. Keluarga Ginem adalah satu dari 43

keluarga di Desa Karang Patihan yang mengalami keterbelakangan mental dan sangat miskin. Dari total penduduk desa ini yaitu 5.439 jiwa, sebanyak 111 di antaranya mengalami keterbelakangan mental sedang dan 69 orang parah. Idiot parah maksudnya tak lagi bisa mencari nafkah sendiri dan harus menggantungkan dari pemberian orang lain. Itulah sebabnya daerah tersebut disebut kampung idiot. Tak hanya di desa ini, masih ada ratusan warga di Desa Pandak Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon yang sebagian penduduknya mengalami nasib yang sama. Ketiga desa tersebut letaknya bersebelahan hanya dipisahkan oleh gugusan perbukitan Rajekwesi. Desa Sidoharjo berada di lereng sebelah utara, Desa Karang Patihan di lereng timur, sementara Desa Pandak berada di tenggara. Namun jarak antar desa mencapai puluhan kilometer dipisahkan hutan dan perbukitan kapur. . Date: 2013.02.16 | Category: Uncategorized | Tags: **Mereka Terpaksa Berebut Gizi dengan Tikus** (Sumber: Radar Ponorogo, Rabu 22 Februari 2012).

Masih banyak penduduk yang mengalami *down syndrome* (keterbelakangan mental). Jumlahnya mencapai ratusan. Sebagaimana dikutip dari *Jawa Pos* (15/4), penderita *down syndrome* paling banyak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon. Yakni, 323 orang. Kemudian di Desa Karangpatihan dan Desa Pandak, keduanya di Kecamatan Balong, ada 69 orang dan 53 penderita *down syndrome*. Tak sedikit warga idiot yang hanya memakan daun-daunan. Ada pula warga idiot yang terpaksa dipasung selama puluhan tahun karena kerap marah dan menabrak apa saja yang ditemuinya.

Pemberitaan lain adalah sebagaimana diambil dari [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) yang ditulis oleh Eko Prasetyo dalam Graha Pena edisi 15 April 2012 sebagai berikut: Kabupaten Ponorogo tidak hanya terkenal dengan budaya dan kesenian reog yang sudah tersohor kemana mana, ternyata juga menyimpan kondisi keterpurukan dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya, yang cukup memilukan dan menyedihkan, entah sampai kapan pemerintah kabupaten Ponorogo ini menyembunyikan masyarakatnya dari dunia luar dengan nasib, yang dialaminya selama bertahun tahun hingga sampai saat ini beginilah wajah kabupaten Ponorogo yang terlihat gemerlap dan mempunyai kantor megah dengan lantai delapan yang merupakan kantor kabupaten yang paling megah di Indonesia ini, dengan sarana dan prasaranya namun kemegahan kantor Pemkab ini, tidak sebanding dengan kehidupan masyarakatnya yang berada di pinggiran, mereka selalu kekurangan gizi dan penuh keprihatinan. Kampung idiot muncul di desa Krobat, Sidowayah dan Sidoarjo yang berada di kecamatan Jambon Ponorogo/kampung idiot kedua ditemukan di desa Karang Patihan kecamatan Balong, dan kali ini kampung idiot jilid tiga ditemukan lagi di desa Pandak kecamatan Balong Ponorogo/kondisi kampung idiot ketiga ini tidak jauh kondisinya dengan kampung idiot yang jilid pertama dan kedua, kondisi masyarakatnya cukup mengesankan dan memprihatinkan karena warga yang berada di desa Pandak yang memiliki 4 dusun ini rata rata penduduknya mengalami kurang gizi dan miskin sehingga untuk makanpun mereka hanya makan nasi gaplek atau tiwul selama bertahaun tahun.

Banyaknya media yang mengekspose kampung idiot ini yang paling gencar adalah di tahun 2011 yakni pada bulan Januari hingga bulan Juni, dalam jangka waktu kurang lebih setengah tahun ini baik media lokal maupun nasional bisa mencapai 5 kali dalam satu bulannya, namun lama kelamaan mereka juga tidak akan mengekspose secara terus-menerus. (Sumber: survei lapangan wawancara dengan kepala humas Pemkab Ponorogo).

Jika dikaji dari hasil survey pendahuluan ini di mana selama kurun waktu 6 bulan tersebut paling tidak terdapat pemberitaan mengenai kampung idiot diberitakan 10 kali dengan berbagai macam pemberitaan yang materinya cenderung menyudutkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap pembentukan citra dari Pemkab Ponorogo dengan di eksposenya kampung idiot secara terus menerus di media.

Menurut pendapat Yulianita (2003:42) mengatakan dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar PR memberikan penjelasan bahwa Tujuan Humas adalah untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan citra yang baik dari organisasi kepada publik yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi dari pada publik yang bersangkutan, Yulianita pun berkata dalam bukunya dasar-dasar PR, ada 4 hal prinsip dari tujuan PR yakni: menciptakan citra yang baik, memelihara citra yang baik, meningkatkan citra yang baik, memperbaiki citra jika citra organisasi kita menurun atau rusak.

Untuk dapat menjalin hubungan dengan media, humas harus memiliki strategi yang tepat karena menjalin hubungan dengan media juga merupakan

cara untuk meningkatkan informasi dan citra sebuah instansi di mata masyarakat, yaitu khususnya hubungan dengan pers (*press relations*), yang dimaksud dengan pers disini adalah pers dalam arti luas, yakni semua media massa. Jadi selain surat kabar, juga majalah, kantor berita, radio siaran, televisi siaran dan lain-lain (Effendy, 2005:137).

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka kondisi yang terpenting yang harus dijaga adalah hubungan yang harmonis antara pers dengan sumber berita. Humas sebagai sumber berita juga memiliki peranan yang penting. Hubungan antara keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Hubungan yang baik yang terpelihara terus akan memperlancar kegiatan humas khususnya publikasi. Humas Pemkab Ponorogo sebagai ujung tombak pengelolaan informasi, dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian kinerja humas Pemerintah Kabupaten Ponorogo direspon masyarakat luas dengan pendapat yang beragam, ada yang merasa puas dan belum puas terhadap kinerja humas. Keberhasilan suatu strategi bisa diukur dari bagaimana pedoman tata kelola kehumasan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah dapat terlaksana atau belum. Penelitian terkait dengan judul yang diteliti saat ini mengenai strategi humas adalah penelitian yang dilakukan oleh Lily

Nurjana Tehuyo (2005) tentang Strategi Humas dalam Meningkatkan Citra Lembaga (Studi pada Humas Pemkab Masohi). Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa strategi yang dilakukan oleh humas untuk mewujudkan citra positif yaitu dengan sikap terbuka, tidak alergi dengan media dan melaksanakan pembangunan yang tepat waktu dan sasaran. Jika ada isu humas segera mengkonfirmasi dan diteruskan dalam pengimplementasian dan juga butuh dukungan dari masyarakat. Penelitian lain dilakukan oleh Ayu Puspita Sari (2009) dengan judul Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Malang dalam Menjalin Hubungan dengan Media Cetak. Hasil dari penelitian ini adalah mengembangkan akses informasi publik melalui ketersediaan data dan informasi yang aktual, faktual dan akurat serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pemberitaan melalui media massa serta kerjasama dengan pers. Dari beberapa strategi tersebut dalam rangka menjalin hubungan baik dengan media adalah sebagai berikut: (1) mengelola relasi, relasi tugas dan pribadi, pemberian kartu ucapan pada saat lebaran atau natal kepada wartawan. (2) mengembangkan strategi: menyediakan naskah sambutan bupati dan dokumentasi untuk selanjutnya membuat *release* dan memberikannya kepada media. (3) mengembangkan jaringan: membangun relasi dengan wartawan lokal, lalu berkembang dengan wartawan nasional untuk selanjutnya wartawan internasional.

Strategi untuk setiap permasalahan tentulah berbeda jika kita ingin mengetahui kegiatan/kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Humas sebagai juru



bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan pimpinan, latar belakang kebijakan yang diambil dan tujuan yang diharapkan, disamping itu humas pemerintah harus memiliki strategi yang baik untuk menangani permasalahan yang dihadapi sekaligus mendapatkan citra yang baik oleh pemerintah itu sendiri. Setiap kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, dan hal itu sangat membutuhkan dukungan publik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Strategi Humas Pemkab Ponorogo Dalam Menangani Ekspose Kampung Idiot Di Media Online. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kurun waktu dari tahun 2013 sampai tahun 2014, yaitu sejak dimulainya ekspose besar-besaran kampung idiot di media pada bulan Januari 2011.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Strategi apa yang dilakukan humas Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menangani ekspose kampung idiot di media online?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan humas Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menangani ekspose kampung idiot di media online.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari sudut kepentingan teoritik, signifikansi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

### **1.4.1 Secara teoritis**

1. Melengkapi dan memperjelas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti tentang humas khususnya yang berkaitan dengan strategi humas pemerintah
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melengkapi konsep dan teori dalam bidang humas umumnya, khususnya yang berkenaan dengan strategi humas pemerintah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian lanjutan mengenai efektivitas humas untuk meningkatkan keprofesionalitas para anggota organisasi, serta untuk peningkatan citra organisasi.

### **1.4.2 Secara praktis**

1. Bagi Perusahaan

Dari aspek praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun motivasi kepada pemerintah khususnya para praktisi Humas Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menangani kasus tereksposnya kampung idiot di media online

2. Bagi Program Studi

Sebagai bahan masukan untuk mahasiswa program studi ilmu komunikasi selanjutnya yang akan meneliti tentang kegiatan kehumasan dalam mengembangkan strategi humas

### 3. Bagi Peneliti

Adalah sebagai syarat kelulusan program studi yang penulis sedang tempuh yaitu studi ilmu komunikasi dengan jenjang strata-1. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media pengembangan dengan praktek yang didapat di lapangan